

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah karya penelitian, salah satunya seperti karya tulis berupa skripsi, tidak ada yang bersifat mutlak asli dan benar-benar baru dihasilkan oleh seorang penulis maupun seorang peneliti, dimana penelitian tersebut tidak terlepas dari pengaruh penelitian yang ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyadari pentingnya melakukan beberapa perbandingan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang digarap. Pada bagian literatur review ini penulis akan berfokus terhadap literasi yang relevan dan memiliki korelasi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Literatur utama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ebru Eren pada tahun 2020 dengan judul penelitian “*Education Policies as a Tool of Soft Power: Alliance Française and Yunus Emre Institute*”. Dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Ebru Eren relevan dengan penelitian yang penulis susun program dan cara negara Prancis sama dengan yang dilakukan di Indonesia melalui program *Institute Franch Indonesia* (IFI) penelitian yang kemudian ditulis oleh Ebru Eren membahas dan menyimpulkan bahwa alat diplomasi yang paling relevan dan efektif untuk masa yang sekarang adalah Soft dimana sebuah negara berkembang tergantung pada berbagai faktor politik dan ekonomi, tetapi juga pada diplomasi publik; yaitu diplomasi budaya yang ditempuh negara dalam politik luar negeri. Mengingat bahwa pendidikan adalah bagian dari diplomasi budaya, bisa kita andalkan kebijakan pendidikan adalah alat soft power yang efektif. Perlu dicatat bahwa ada hubungan yang tak terhindarkan antara "kebijakan pendidikan" dan "lunak kekuasaan", berbeda dari negara bagian ke negara bagian. Dalam konteks ini, penting untuk memeriksa

kebijakan pendidikan lembaga budaya yang negara beroperasi luar negeri. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis kebijakan pendidikan di Alliance française dan Institut Yunus Emre dalam konteks soft power. Institusi pendidikan ini akan dibandingkan, dan perhatian khusus akan diberikan pada kebijakan pendidikan. Dalam tulisan ini penulis mengutip bahwa, kebijakan pendidikan Alliance française dan Yunus Emre Institute dianalisis sebagai sebuah bagian integral dari diplomasi budaya, masing-masing dalam konteks soft power Perancis dan soft power Turki. Perbandingan lembaga-lembaga budaya ini mengarah pada hasil bahwa kebijakan pendidikan digunakan sebagai alat lunak kekuasaan berbeda sesuai dengan praktik diplomasi budaya Prancis dan Turki. Bukan hanya prioritas budaya yang mengubah praktik diplomasi budaya sepenuhnya di Prancis dan di Turki, tetapi juga praktik budaya yang berbeda ini memiliki jejak beberapa nilai sosiopolitik, masing-masing seperti ideologi Revolusi Perancis dalam konteks Alliance française dan seperti ideologi tradisional Ottomanize di konteks Institut Yunus Emre (EREN, 2020)'.

Literature yang Kedua ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Shu-chin Huang pada tahun 2020. Dimana pada penelitian ini menegaskan bahwa sangat menarik untuk melihat bagaimana organisasi seperti Alliance Française yang di Indonesia di kenal sebagai Institute Franch Indonesia menangani masalah menurunnya popularitas Perancis. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana Alliance Française di Thailand melakukan promosi bahasa dan budaya Perancis dalam rangka menjaga pentingnya bahasa Perancis dan budaya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dari kontak awal antara Thailand dan Perancis, Hubungan kedua negara diwarnai dengan ikatan politik. Hal ini didasarkan pada imperialisme Perancis, yang berlanjut hingga periode Kolonisasi Perancis di Indocina. Berdirinya Alliance Française di Thailand juga terkait dengan kolonialisme dengan tujuan menyebarkan bahasa Perancis dan budaya di Asia. Mengenai strategi yang digunakan Alliance Française untuk

mempromosikan budaya Perancis dan bahasa, hasil analisis berdasarkan wawancara dengan direktur Alliance Française, Mr Silvain Bano, Alliance Française Bangkok, mengungkapkan bahwa penekanannya organisasi ini sedang membangun jembatan pertukaran budaya antara Thailand dan Perancis melalui berbagai kegiatan kebudayaan khususnya di bidang seni. Namun demikian, kelompok sasaran Alliance Française tidak hanya orang Thailand dan Francophone tetapi juga orang lain orang asing yang tinggal di Bangkok (Huang, 2020).

Adapun literatur yang Ketiga adalah sebuah tulisan yang di publish oleh *JOSR: Journal of Social Research* April 2022 oleh Bong George Aldrin. Yang membahas bagaimana Kebijakan Frankofoni menjadi kebijakan Perancis yang coba dipromosikannya di Indonesia sebagai bentuk diplomasi budayanya. Jika Kebijakan Diplomasi Budaya berfokus pada penyebaran dan pengenalan akan budaya Perancis di Indonesia secara umum, Kebijakan Frankofoni berfokus pada promosi akan bahasa Perancis di dunia, salah satunya di Indonesia melalui kegiatan kebudayaan seperti program tahunan Pekan Frankofoni. Melalui program Pekan Frankofoni yang juga dapat diartikan sebagai bentuk diplomasi budaya mampu sekaligus mempromosikan kebijakan Frankofoni dan juga Kebijakan Diplomasi Budaya Perancis. Hal ini karena adanya kepentingan yang sama yaitu untuk mempromosikan budaya dan bahasa Perancis, agar tidak hanya dikenal tetapi juga dapat diminati oleh masyarakat Indonesia (Aldrin, 2022).

Pada tulisan yang di tulis oleh Bong George Aldrin ini menitik beratkan pembahasan sistem kebijakan Prancis demi mendongkrak Diplomasi Budaya Prancis sedangkan pada tulisan yang penulis susun berfokus membahas tentang isi program dan langkah-langkah yang diambil oleh negara Prancis untuk mempromosikan budayanya melalui Lembaga *Institute Franch Indonesia*.

Literature yang ke empat adalah sebuah penelitian yang ditulis oleh Foncin & Cambon yang berfokus pada bagaimana Prancis membangun aliansi melalui kebudayaan dan bahasa di Amerika

Latin. (Foncin & Cambon, 1883) Pada literatur ini tujuan Perancis dan juga metode yang digunakan kurang lebih sama seperti yang di lakukan di Indonesia yaitu untuk mempromosikan bahasa Perancis ke seluruh dunia dan bagaimana Bahasa Prancis sudah menjadi salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Seperti bahasa Inggris, bahasa ini digunakan di lima benua, dengan perkiraan 175 juta penutur. Untuk mempromosikan bahasa Prancis di Amerika Latin, Alliance Française atau dikenal juga dengan Intstitute Franch menawarkan pelajaran bahasa kepada siapa saja yang ingin mempelajarinya baik itu pelajar, keluarga, perusahaan, maupun anak-anak dan orang lanjut usia. Di Amerika Latin, asosiasi berfokus pada mempromosikan budaya Perancis dan nilai-nilai Perancis melalui berbagai acara yang mana terdapat pusat Alliances Française yang berbasis di Argentina, Meksiko, Venezuela, dan Brasil.

Literature yang terakhir adalah tulisan Dr. Sangya Pandey dan Mr. Srikant Manubansh pada tahun 2019 di mana pada tulisan ini menjelaskan mengenai sejarah dan sepaik terjang kerjasama budaya antara Perancis dan India melalui pertukaran budaya di mana Pertukaran budaya pertama antara India dan Perancis pertama kali dimulai dengan festival budaya terkenal, "Bonjour India", yang pertama kali diluncurkan dengan sukses besar pada tahun 2009-2010, Namun pada tulisan ini bukan hanya menitik beratkan bagaimana Perancis menyebarkan bahasa dan budayanya namun lebih dari itu kerjasama yang dilakukan diharapkan bisa mendatangkan potensi kunjungan yang mana pada tahun 2018, sekitar 8.000.000 wisatawan India mengunjungi Prancis untuk melihat bagaimana potensi kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu bidang penting dalam kemitraan mereka, yang mendapat dorongan baru pembentukan Komisi Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi Indo-Prancis (France, Pandey, Manubansh, & Professor, 2019) .

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

Dan untuk memenuhi kaidah keilmuan dan juga mempermudah proses penelitian , maka peneliti perlu untuk memaparkan teori-teori dan juga konsep yang menjadi landasan teoritis bagi penelitian yang dilakukan ini.

2.2.1 Diplomasi

Diplomasi adalah salah satu unsur dari hubungan internasional. Diplomasi merupakan elemen ringan namun penting dalam meraih kepentingan nasional. Dan Menurut Sir Earnest Satow mengenai diplomasi yang ia tulis di bukunya *Guide to Diplomatic Practice* mengatakan bahwa “diplomasi merupakan penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah dengan negara-negara berdaulat.(Prayuda & Sundari, 2019)”. “Dan, diplomasi terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Soft Diplomacy: diplomasi dalam bentuk penyelesaian secara damai dalam bidang kebudayaan, bahasa, persahabatan dan ekonomi
2. 2. Hard Diplomacy: diplomasi dalam bentuk perang, yaitu agresi militer dan politik”(Prayuda & Sundari, 2019).

Dengan adanya diplomasi maka diharapkan bahwa suatu kepentingan yang bersebrangan mudah untuk diidentifikasi dan juga sebaliknya jika ada suatu kepentingan yang sama maka dapat untuk dipertemukan sehingga akan terjalin kerjasama yang sesuai dengan harapan kepentingannya. Berdasarkan definisi diplomasi diatas, maka langkah diplomasi yang diambil oleh suatu negara merupakan langkah yang telah

dipertimbangkan melalui pertimbangan dari beberapa faktor, baik itu faktor yang mendorong dari lingkungan internasional ataupun lingkungan diplomatik.

2.2.2 Diplomasi Publik

Teori Diplomasi Publik, dimana diplomasi publik memiliki pengaruh dalam membentuk citra sebuah negara. Diplomasi Publik ideal jika citra suatu negara yang dibangun oleh diplomasi publik dapat menumbuhkan sebuah kepercayaan negara lain mengenai potensi dan juga prestasi negara yang bersangkutan, sehingga bisa memberikan sebuah keuntungan kepada negara lain yang jika melakukan kerjasama. “Diplomasi publik diartikan sebagai proses komunikasi antar pemerintah kepada masyarakat publik mancanegara dimana hal ini memiliki tujuan untuk memberikan sebuah pemahaman atas negara, sikap, intuisi, budaya, kepentingan nasional dan juga danya kebijakan yang diambil oleh negaranya”. (Hennida, 2009) . Diplomasi Publik dianggap sebagai salah satu cara usaha tertinggi dalam melakukan komunikasi antar negara dengan masyarakat dimana dengan adanya diplomasi publik ini akan berdampak pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan juga dengan adanya diplomasi publik ini menurut Jan Mellisen ia berpendapat bahwa ‘Diplomasi Publik adalah usaha untuk dapat mempengaruhi orang atau suatu organisasi lain di luar negaranya dengan cara yang positif hingga dapat mengubah suatu cara pandang orang atau negara lain terhadap negaranya.(Hennida, 2009)’.

Keberadaan Diplomasi Publik juga tidak lepas dari adanya komunikasi yang terjalin dalam pengomunikasian kebijakan luar negeri terhadap publik dimana dalam diplomasi publik hal ini juga melibatkan semua stakeholder dan juga prosesnya. Stakeholder disini tidak hanya Departemen Luar Negeri tetapi juga melibatkan departemen dalam pemerintah, swasta, NGO dan juga media serta individu. Seperti yang terjadi dengan Prancis yang menggunakan citra nya sebagai salah satu cara yang efektif untuk memperkuat hubungan bilateral mereka. Dengan adanya citra Prancis

dengan kekayaan warisan budaya dan yang kaya akan sistem pendidikan yang terkenal maka dianggap mampu memberikan kontribusi yang berharga dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di Indonesia. Citra positif Prancis memancing negara lain yaitu Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan dimana dalam pendidikan, Prancis juga bisa memberikan akses ke berbagai Institusi pendidikan tinggi terkemuka dan adanya program pertukaran siswa dan pelajar. Dimana dalam adanya kerjasama program penukaran siswa ini memungkinkan kedua negara untuk dalam belajar, berkembang dan berkolaborasi bersama di lingkungan akademis yang berbeda. Di sisi lain dalam bidang budaya, pertukaran yang terjadi bisa melalui pertukaran seni, sastra dan juga musik serta saling mempelajari kedua bahasa dari kedua negara yang ada. Keberadaan diplomasi publik sebagai salah satu cara komunikasi untuk mempengaruhi negara lain agar mau percaya dalam melakukan kerjasama sudah dilakukan Prancis dengan adanya hubungan baik dan kepercayaan Indonesia dalam melakukan kerjasama ini.

Diplomasi publik tidak dimaksudkan untuk menggantikan upaya pemerintah dalam diplomasi tradisional, melainkan untuk melengkapinya. Idealnya, diplomasi publik harus membuka jalan bagi negosiasi antar pemerintah, memberikan informasi penting dan menawarkan perspektif berbeda mengenai suatu isu. Baik pemerintah maupun masyarakat akan bekerja sama untuk memanfaatkan keahlian, pengalaman dan sumber daya yang ada, dan memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai tawar pemerintah. Hal ini karena aktor-aktor diplomasi garis depan menunjukkan karakteristik aktivitas berbasis kekuasaan dan interaksi ketat yang diimbangi dengan upaya, atau upaya yang lebih fleksibel.

2.2.3 Diplomasi Budaya

Dengan adanya diplomasi budaya yang merupakan salah satu bentuk dari soft power dimanfaatkan sebagai alat untuk mempromosikan dan juga melindungi kepentingan nasional. Di mana di dalamnya terdapat beberapa aspek yang telah menjadi bagian dalam kegiatan diplomasi seperti seni, bahasa, informasi. Dalam menghadapi era globalisasi dan integrasi internasional maka dalam hubungan antarnegara adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam politik luar negeri. Agar suatu kebijakan politik luar negeri dapat diselenggarakan dengan baik maka semua negara harus melakukan diplomasi. Dapat dikatakan bahwa diplomasi budaya tidak hanya menekankan pada penerapan dan pemberdayaan kebudayaan saja untuk dapat memperbaiki perilaku diplomasi, akan tetapi juga memanfaatkan adanya diplomasi untuk dapat menghargai dan melestarikan kebudayaan. Dan diplomasi budaya juga “Pada intinya, diplomasi budaya adalah sebuah kumpulan dari *“national policy designed to support the export of representative sample of that nation’s culture in order to further the objectives of foreign policy”*. Definisi tersebut juga dapat diinterpretasikan sebagai, *“any policies designed to encourage public opinion to influence a foreign government and its attitudes towards the sender”*, di mana diplomasi budaya menekankan penggunaan budaya sebagai modal utamanya dan secara natural memberikan ruang untuk partisipasi yang lebih luas. Diplomasi budaya menggunakan hasil-hasil kebudayaan sebagai manifestasi utamanya, misalnya, melalui promosi kebudayaan yang dimiliki oleh suatu negara, melalui mode pertukaran edukasi, seni dan budaya populer (literatur, musik, dan film) , (Ha, 2016)” .

Diplomasi budaya juga merupakan contoh utama dari soft power dimana letak budaya lah yang menarik bagi masyarakat lain. Karena diplomasi budaya menawarkan suatu yang tidak dapat diberikan oleh diplomasi politik, ekonomi, dan diplomasi militer. Diplomasi budaya menjadi unsur

istimewah karena kemampuannya untuk meyakinkan pihak atau negara lain melalui budaya, nilai-nilai, dan juga ide serta tidak melalui kekerasan yang mana hal itu menggunakan kapabilitas militer dan politik. “Adapula kekuatan utama dari diplomasi budaya :

a. Diplomasi budaya adalah koneksi 2 arah, bukan paksaan unilateral. Dengan demikian, diplomasi budaya memberikan ruang bagi dialog yang mengarah pada pembentukan rasa saling percaya;

b. Diplomasi budaya dapat meningkatkan pemahaman di antara masyarakat dan budaya karena diplomasi budaya menyediakan apa yang menarik bagi penerimanya; dan

c. Diplomasi budaya beroperasi dalam rentang waktu yang panjang sehingga dapat menghubungkan pihak-pihak dari kelompok yang berkonflik, bahkan pada keadaan hubungan diplomatik yang negatif. Oleh karena itu, diplomasi budaya dapat bertindak sebagai satu-satunya solusi yang efektif ketika muncul ketegangan dan konflik.(Ha, 2016)”.

Diplomasi kebudayaan juga mampu dilakukan oleh non negara dan negara , baik itu bisa dilakukan oleh individual, kolektif, warga negara dan juga diplomasi kebudayaan dilihat dari pola hubungannya bisa saja terjadi antar pemerintah dan pemerintah dan bisa terjadi antara pemerintah dan swasta dan juga antara swasta dan swasta . Pelaku utama pada penyelenggaraan diplomasi kebudayaan ini tentu saja berhubungan langsung dengan adanya kerjasama dan layanan aktivitas budaya yang menyangkut keduataan besar Prancis. Dalam konteks berdirinya *Institut Francais d’Indonesie* terlihat bahwa unsur kebudayaan lah yang menjadi tujuan utama mereka dimana untuk dapat memajukan Prancis dalam bentuk pembelajaran dan penggunaan bahasa, penyebaran budaya dan juga memiliki tujuan untuk dapat mempromosikan keberagaman dan pemahaman antar budaya

serta mampu meningkatkan minat para pelajar Indonesia untuk dapat melanjutkan studinya ke Prancis sehingga beradanya *Institute Francais d'Indonesia* tidak hanya sebagai wadah saja tetapi menjadikan Prancis sebagai negara tujuan untuk pendidikan.

Keterkaitannya *Intitute Francais d'Indonesie* juga dengan teori “diplomasi budaya dilihat dari untuk dapat melakukan diplomasi budaya, maka pemerintah dan juga masyarakat dapat melakukannya melalui adanya pertunjukan seni dan juga sastra serta dapat melakukan diplomasi budaya dengan adanya pendidikan yang maha hal ini bisa menarik kalangan elite ataupun bisa melalui budaya yang populer. Serta, dengan adanya diplomasi budaya, tentu saja diharapkan akan terjadi sebuah interaksi berupa pertukaran sehingga bisa dikatakan jika dengan adanya diplomasi budaya maka sebuah negara mampu memiliki pengaruh besar atas negara lain tanpa menggunakan kekerasan”(Zaman, Effendi, Ridwan, & Fahlevi, 2023).

“Diplomasi budaya pun mempunyai memiliki tujuan untuk dapat mempengaruhi audiens atau para penikmat budaya di suatu bangsa serta menggunakan pengaruh tersebut sebagai jembatan jangka panjang sebagai suatu negara dalam bekerjasama. Kehadiran diplomasi budaya diharapkan mampu mempengaruhi orang asing untuk berpikiran positif terhadap budaya suatu bangsa, rakyat, dan dapat membantu mengubah kebijakan ataupun lingkungan politik sesuai dengan tujuan negaranya serta mampu meningkatkan kerjasama yang lebih besar. (Zaman et al., 2023)“

Dengan adanya diplomasi budaya yang dilancarkan oleh Prancis, menggunakan *Intitut Francais d'Indonesia* yang didirikannya di Indonesia merupakan satu langkah awal dari bentuk kerjasama yang dilakukan Prancis terhadap Indonesia dengan menaruh fokusnya pada penyebaran budaya yang ia bawa. Kepentingan penyebaran budaya Prancis di Indonesia didukung dengan sikap Indonesia yang terbuka dengan mau menjalin kerjasama

dengan Prancis. Hal itu terbukti dari adanya lembaga resmi milik Prancis yaitu *Institute Francais d'Indonesie* yang berdiri di beberapa titik kota besar di Indonesia seperti yang tersebar di Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta. Dengan berbagai macam kegiatan atau program yang ada di dalam lembaga resmi milik Prancis ini semakin menguatkan Prancis dalam melakukan diplomasi budayanya . karena dengan adanya berbagai macam program atau kegiatan yang dilakukan oleh Intitut Francais d'Indonesie merupakan bentuk dari strategi Prancis dalam mempromosikan negaranya namun melalui bidang budaya.

2.2.4 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional menurut Menurut Norman J. Padelford, adalah: “National interest of a country is what a governmental leaders and in large degree also what its people consider at any time to be vital to their national independence, way of life, territorial security and economic welfare”(Gabriella, 2013). Pendapat itu mengatakan bahwa esensi diplomasi maupun perang merupakan wahanan politik luar negeri yang paling lazim digunakan sebuah negara dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Dan juga “kepentingan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita suatu bangsa berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain, dengan kata lain gejala tersebut merupakan suatu normatif atau konsep umum kepentingan nasional. Arti kedua yang sama pentingnya biasa dianggap deskriptif, dalam pengertian kepentingan nasional hanya dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai negara secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Kepentingan nasional dalam pengertian deskriptif berarti memindahkan metafisika ke dalam fakta (kenyataannya). Dengan kata lain kepentingan nasional serupa dengan para perumus politik luar negeri menurut Paul Seabury. (Gabriella, 2013)“ .

2.3 Asumsi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, bukti empiris, kerangka teori dan postulat-postulat penelitian terdahulu yang telah di paparkan sebelumnya, maka penulis membuat asumsi yang masih perlu untuk di uji kebenarannya. Adapun rumusan asumsi adalah sebagai berikut “ Bahwa melalui *Institute Franch di Indonesia* (IFI) yang dimiliki oleh Pemerintah Prancis maka diplomasi kebudayaan Prancis yang dilakukan di Indonesia tidak berhasil mengangkat dan meningkatkan angka minat bagi para mahasiswa dan mahasiswi serta pelajar di Indonesia untuk melanjutkan studinya ke Prancis”.

2.4 Kerangka Analisis

